

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran ini, peneliti berkesimpulan berdasarkan pada *elaborasi* teori dengan data-data selama penelitian menyimpulkan sebagai berikut;

1. **Komunikasi.** Ada tiga hal penting yang ada hubungannya dengan keterlibatan para pegawai dalam pengambilan keputusan yaitu: kontrol, motivasi dan pembelajaran. Selanjutnya keterlibatan para pegawai dalam pengambilan keputusan akan memunculkan dorongan dan motivasi dalam hal *inovasi* dan *performance*. Sedangkan dalam hal pembelajaran keterlibatan akan memungkinkan terjadinya pembelajaran dan pengembangan di kalangan para *staf* di samping dapat meningkatkan kerjasama diantara sesama *staf*, dengan pemimpin dalam hal pengambilan keputusan. Walau demikian keputusan tetap pada pemimpin KPI.
2. **Sumber Daya.** Analisis kebutuhan sebagai satu proses formal untuk menentukan jarak atau kesenjangan antara keluaran dan dampak yang nyata dengan keluaran dan dampak yang diinginkan, kemudian menempatkan deretan kesenjangan ini dalam skala prioritas, lalu memilih hal yang paling penting untuk diselesaikan masalahnya. Beberapa kata kunci dalam analisis kebutuhan adalah: (1) kondisi *existing*, (2) kondisi ideal dan (3) skala prioritas. Kesenjangan antara kondisi yang ada (*existing*) dengan kondisi ideal menimbulkan kebutuhan. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tentu memerlukan sumber daya yang mungkin terbatas, sehingga harus ada skala prioritas atas pemenuhan kebutuhan tersebut. Dalam setiap evaluasi rencana kegiatan perlu disusun *alternative metode* pelaksanaan, sehingga pada akhirnya dapat dipilih mana metode pelaksanaan yang paling ekonomis, efisien, dan efektif.

3. **Disposisi.** Secara keseluruhan terkait dengan disposisi atau sikap pelaksana, maka disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyusunan anggaran di KPI sudah berjalan maksimal yang ditunjukkan dengan adanya sikap pelaksanaan yang melaksanakan kebijakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta adanya sikap pelaksana yang mendukung kebijakan kearah penerimaan.
4. **Birokrasi.** Dengan perubahan birokrasi yang cukup baik sekarang ini di KPI sangat membantu dalam proses kinerja para pegawai, salah satu cara dengan menyederhanakan birokrasi sesederhana mungkin karena penyederhanaan birokrasi itu sendiri adalah membangun birokrasi yang dinamis yang punya *fleksibilitas* tinggi, kapabel, berbudaya unggul dan organisasi yang berbasis kinerja sehingga bisa melahirkan kebijakan yang adaptif yang *terintegrasi* ke setiap unit. Karena harus diakui, indikasi budaya birokrasi yang korup yang memanfaatkan dan menyalahgunakan jabatan masih terjadi. Dengan struktur yang disederhanakan, diharapkan kinerja birokrasi lebih efisiensi dan efektif. Sebab bagaimanapun struktur birokrasi yang gemuk membutuhkan biaya banyak.

5.2.Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut;

1. Perlunya upaya peningkatan dan penguatan secara kelembagaan terutama kelemahan secara kelembagaan KPI baik administarsi maupun kebijakan. Hal ini lebih dikarenakan *nomenklatur* dari pemberian fungsi KPI tidak diberikan secara umum, sehingga tidak dapat mencakup semua fungsi, tugas, dan kewenangan KPI secara menyeluruh. Fungsi sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) dielaborasi dalam kewenangan KPI yang diatur dalam pasal 8 ayat (2) yang mengatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu diperlukan adanya perubahan terhadap undang-undang yang mengatur tentang posisi komisi penyiaran Indonesia. Ini dimaksudkan agar secara kelembagaan KPI tidak lagi berada dalam

wilayah “abu”. Status kelembagaan KPI tidak lagi berada di wilayah kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

2. Atas dasar pendekatan Edward landasan yang penting bagi Komisi Penyiaran Indonesia adalah independensinya terhadap lembaga pemerintah (*birokrasi*). Supaya investigasi dan rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia dapat dipercaya (*kredibel*) baik itu oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, maka Komisi Penyiaran Indonesia harus menjaga dan melindungi integritas dan imparialitasnya. Umumnya Komisi Penyiaran Indonesia dalam sektor pelayanan publik mempunyai *yurisdiksi* yang luas atas lembaga-lembaga pemerintah. Salah satu ukuran yang ditekankan dalam setiap pelaksanaan peran tiap lembaga negara adalah independensinya. Komisi Penyiaran Indonesia harus meletakkan posisinya secara independen terhadap setiap kekuatan dan kepentingan politik ataupun kompetensi dan profesionalitas dalam bertugas.
3. Diperlukan dorongan untuk mempelajari berbagai perubahan aturan terkait dengan administrasi negara menjadi perhatian bagi KPI dalam mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja begitupun halnya dengan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia terkait dengan administrasi keuangan negara. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III.